

**PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA
PROGRAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
DI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

SKRIPSI

OLEH :

RISKI MUTIA DEWI
NPM: 1503100109

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **RISKI MUTIA DEWI**
N P M : 1503100109
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Rabu, 11 Oktober 2019
W a k t u : Pukul 07.45 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLI, SH., MM**
PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**
PENGUJI III : **Drs.R.KUSNADL, M.AP**

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **RISKI MUTIA DEWI**
N.P.M : 1503100109
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PROGRAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI**

Medan, 11 Oktober 2019

Dosen Pembimbing

Drs. R. KUSNADI, M.AP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd.



Dean,

Dr. ARIEF SALEH, S.Sos, MSP.

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, RISKI MUTIA DEWI NPM: 1503100109 menyatakan dengan sungguh-sungguhnya:

1. Saya menyadari memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat atau karya menjiplak dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan saya yang telah saya peroleh serta pembatalan dan penarikan kembali ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, Oktober 2019



Yang Menyatakan

Riski Mutia Dewi
RISKI MUTIA DEWI

ABSTRAK
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PROGRAM
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Nama ; RISKI MUTIA DEWI
Npm : 1503100109

Pengelolaan Pasar Tradisional adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan pasar di Kota Binjai akan meningkatkan pula retribusi pasar. Sebaliknya jika pengelolaan yang di berikan oleh pemerintah kurang efektif dan kurang efisien sementara pihak yang di layani nya terus di tuntutan untuk memenuhi kewajiban dengan dengan jalan membayar berbagai jenis retribusi, sementara di sisi lain hak-hak mereka kurang di penuhi , pada akhirnya akan timbul ketidakpuasan dari para konsumen /pelanggaran pasar, maka semakin lama akan meninggalkan pasar tradisional karena ketika mereka masuk kepasar sudah di pungut berbagai biaya, sementara kenyamanan serta pelayanan terhadap sarana dan prasarana tidak di rasakan sesuai dengan keinginan para pelanggan. Tujuan penelitian in untuk mengetahui tentang pengawasan dalam pengelolaan Pasar Tradisional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan internal terhadap pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai efektif. Namun ada beberapa tentang masalah penataan seperti sampah yang masih belum berjalan dengan baik. Bentuk pengawasan internal yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai terhadap pasar tradisional Kota Binjai adalah pemantauan (*monitoring*) yang didalamnya terdapat pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan pedagang pasar, pengelolaan sampah pasar, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pasar serta pembangunan pasar tradisional. Kemudian bentuk pengawasan lainnya adalah evaluasi dan laporan hasil kerja yang didalamnya terdapat penyusunan tujuan proyek serta proses *input* dan *output*, meninjau dan mempelajari pengaduan dan keluhan masyarakat seputar pasar tradisional, melakukan *survey*, serta pendokumentasian kerja dan kondisi lapangan untuk laporan hasil kerja.

Kata Kunci (*Keyword*) : Pengawasan Internal & Pasar Tradisional

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmad dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PROGRAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**”

Ucapan terima kasih terdalam peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya, **Ayahanda saya Anuar & Ibunda saya Sri Wahyuni**, serta **Saudara Kandung Saya Denny Arisandi**, yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan perkuliahan selama ini. Terima kasih banyak telah memberikan banyak nasehat, dukungan moral, dukungan materil serta doa yang tidak putus-putusnya kepada saya serta selalu mensupport saya hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi saya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1 Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- 2 Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- 3 Bapak **Drs. Zulfahmi Ibnu, M.SI** selaku Wakil Dekan satu (WD I) Fakultas Ilmu Sosial da Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4 Bapak **Abrar Adhani S.Sos., M.I Kom** selaku Wakil Dekan tiga (WD III) Fakultas Ilmu Sosial da Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 5 Ibu **Nalil Khairiyah, S.IP., M,PD** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 6 Bapak **Drs. R. Kusnadi, M.AP** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu, selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 7 Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatere Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
- 8 Seluruh pegawai Biro dan Keluarga Besar FISIP UMSU yang selama ini memberi banyak kemudahan demi terselesaikan nya skripsi ini.
- 9 Seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Prindustrian Perdagangan Kota Binjai terkhusus bapak **Drs. M. Uzeir Nasution. Bapak Ferdinand Ginting, Bapak Johannes Liberty Ginting, Ibu Marlise Sirait**, yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset di dinas tersebut.

- 10 **Denny arisandi** dan **Muhammad Abdu** selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.
- 11 Kepada seluruh teman-teman kelas **B IAN Sore pembangunan** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 12 Untuk teman-teman seperjuangan **Aldea Viska, Dwi Cahyani, Siti Hafsa**, yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
- 13 Teman-teman terdekat penulis **Muhammad Iqbal, Eni Lirian, Wiji Rahayu, Ayu Namira, Mutia Putri** dan **Muhammad Reza** yang selalu menghibur penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi.

Akhirnya kepadaseluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT, serta penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun atas segalanya. Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Medan, Oktober 2019

Penulis :

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1. Pengertian Pelaksanaan.....	8
2.2. Konsep Pengawasan.....	10
2.2.1. Pengertian Pengawasan	10
2.2.2. Fungsi Pengawasan	14
2.2.3. Tujuan Pengawasan.....	14
2.2.4. Jenis-Jenis Pengawasan.....	15
2.2.5. Maksud Pengawasan	16
2.2.6. Hambatan Dalam Pengawasan.....	17
2.3. Pengertian Pengawasan Internal	18
2.4. Program	20
2.5. Program Pengelolaan Pasar Tradisional.....	20
2.5.1. Tujuan Pengelolaan Pasar Tradisional	26
2.5.2. Penataan Pasar Tradisional	27
2.5.3. Permasalahan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pasar Tradisional.....	27
2.5.4. Wewenang dan Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Pengawasan.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Kerangka Konsep	31
3.3. Definisi Konsep.....	32
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	33
3.5. Narasumber Penelitian	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7. Teknik Analisis Data.....	37
3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Hasil Penelitian	42
4.1.1. Deskripsi Identitas Narasumber Penelitian	42
4.1.2. Hasil Wawancara	43
4.2. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasar Tradisional merupakan salah satu fasilitas umum yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu dalam hal pangan dan sandang. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut, diderivasi oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk tetap mempertahankan pasar tradisional demikian kuatnya. Namun persoalannya adalah, pasar tradisional masih identik dengan tempat yang kotor, semrawut, sumpek dan beraroma tidak sedap yang disebabkan oleh penumpukan sampah yang bertebaran di mana-mana, oleh karna itu dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di butuh kan pengawasan, melakukan pemberdayaan bersama dalam meningkatkan pemahaman bersama antar pengelola dan pedagang pasar mengarah pada konsep Pasar Tradisional yang bersih, ramah, segar dan terpercaya. Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang di lakukan sesuai dengan rencana yang telah di tentuka sebelumnya.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang di rencanakan menjadi kenyataan pengawasan terhadap pasar tradisional bertujuan

untuk menghentikan dan meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan dan tidak tertib dalam pasar. memiliki cara yang lebih atau pembinaan yang baik untuk mencapai tujuan. Keterlibatan pengawasan dalam Pengelolaan Pasar sangat mampu memberikan masukan berbagai sisi peningkatan pasar tradisional, seperti ketertiban dan keamanan pasar, pengelolaan kebersihan, pengawasan pangan, dll.

Pengawasan menurut lingkungannya dapat dikelompokkan menjadi pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. badan pengawasan internal terdiri atas pengawasan internal, dalam arti luas dan pengawasan dalam arti sempit. pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawasan, yang dibentuk secara internal oleh pemerintah dan lembaga eksekutif . pengawasan internal dalam arti sempit adalah berupa pengawasan administrative yang mempunyai ruang lingkup untuk mengetahui kebenaran data-data *administrative*.

Pengawasan Internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi seperti Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional Keandalan Laporan keuangan Ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Pengawasan Internal bertujuan menilai sistem pengendalian manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka

perbaikan dan atau peningkatan kinerja. Pengawasan salah satu fungsi dalam suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan alat bantu manajerial dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki.

Pasar Tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar tradisional ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena di dalam pasar tradisional terdapat banyak orang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya. Mereka semua adalah orang yang berperan penting dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Indonesia. Dalam pasar tradisional terdapat banyak interaksi yang tidak di temukan dalam pasar modern, dimana para pedagang pasar tradisional tidak membeli suatu barang dagangan yang akan mereka jajakan di tokonya dalam jumlah yang besar dari agen, hal ini di sebabkan karena keterbatasan modal yang mereka miliki tidak mencukupi untuk membeli barang-barang dalam jumlah yang besar kemudian juga mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap untuk menyimpan barang dagangan terlalu banyak karena pedagang tidak

memiliki lemari pendingin untuk menyegarkan barang dagangannya seperti terlihat pada pasar modern.

Di Pasar Tradisional nilai – nilai kekeluargaan dibangun dari hasil interaksi dan komunikasi antar masyarakat. di pasar tradisional pula interaksi antara penjual dan pembeli menemukan eksistensinya dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar tersebut menghilangkan monopoli harga oleh penjual yang menjadi ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Selain itu pola bangunan pasar tradisional sangatlah khas dimana pasar tradisional memiliki lola yang memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung dengan terbuka . dengan kata lain, bagi bangsa Indonesia, pasar tradisional tidak saja merupakan penyangga ekonomi namun juga merupakan asset budaya yang harus di lestarikan.

Pengelolaan Pasar Tradisional adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan pasar di Kota Binjai akan meningkatkan pula retribusi pasar. Sebaliknya jika pengelolaan yang di berikan oleh pemerintah kurang efektif dan kurang efisien sementara pihak yang di layani nya terus di tuntutan untuk memenuhi kewajiban dengan dengan jalan membayar berbagai jenis retribusi, sementara di sisi lain hak-hak mereka kurang di penuhi , pada akhirnya akan timbul ketidakpuasan dari para konsumen /pelanggan pasar, maka semakin lama akan meninggalkan pasar tradisional karena ketika mereka masuk kepasar sudah di pungut berbagai biaya, sementara kenyamanan serta pelayanan

terhadap sarana dan prasarana tidak di rasakan sesuai dengan keinginan para pelanggan.

Bahkan pasar tradisional secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah , sehingga dengan demikian terciptanya suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan . selain itu, sebagai sarana pemutaran ekonomi , pasar tradisional terbukti efektif. Salah satu buktinya adalah perputaran uang di pasar tradisional di pasar tradisional yang setiap hari yang bias mencapai milyaran rupiah, tentunya keberadaan pasar tradisional memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Binjai dari sisi penerimaan retribusi.

Kondisi Pasar di Kota Binjai masih kurang stabil karena fasilitas, sarana dan prasarananya kurang memadai, sehingga pasar terlihat tidak teratur, dan kurangnya kesadaran diri para pedagang terhadap peraturan kebijakan yang telah teralisasi, dan kurang nya ketegasan para petugas pasar dalam pengelolaan Pasar Tradisional.

Pasar di Kota Binjai secara administrative berada di bawah Dinas Perdagangan Kota Binjai, pelaksanaan teknis Dinas (UPTD), pasar untuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), pasar meliputi Pasar Kebun Lada, Pasar Brahrang dan Pasar Tavip , lokasi pasar juga cukup strategis dan tempat nya juga mudah di akses.

Uraian di atas menarik untuk di kaji lebih dalam , sehigga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Pengawasan Internal Pada Program Pengelolaan Pasar Tradisional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada studi pendahuluan di muka dan dengan memperhatikan pada fokus penelitian, maka yang menjadi kajian peneliti, yaitu “Bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan pasar oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan di adakannya penelitian ini adalah: untuk mengetahui tentang pengawasan dalam pengelolaan Pasar Tradisional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini nantinya di harapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi Negara yang berkaitan dengan pengelolaan pasar.
- b. Penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan penelitian secara khusus mengeni bagi instansi pemerintah yang dapat di lakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dalam pengelolaan pasar.
- c. Terkait merupakan suatu informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan di ambil, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan pegelolaan pasar.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Menguraikan pengertian dan konsepsi tentang pengertian pelaksanaan , pengertian pengawasan, pengertian pengawasan internal, pengertian program, pengertian pengelolaan pasar tradisional.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian , defenisi konsep, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan .

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang simpulan dan saran.

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Nurdin Usman (2002:70) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan

dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain.

Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2.2 Konsep Pengawasan

2.2.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Winardi (1998: 78) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem

umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “pengamatan atas

pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya”.

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.” Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.

Menurut Halim dan Damayanti (2007:44) menyatakan bahwa sebuah pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.

- 2) Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop, Itwilkab/kota.

Sementara itu, menurut Fathoni (2006:30), yang mendefinisikan bahwa sebuah pengawasan adalah suatu bentuk dan proses dimana dalam aktivitas kegiatannya menetapkan aparat atau unit lain di dalam sebuah perusahaan/organiasai bertindak dan bertugas melakukan kontrol kerja dan memeriksa data dan laporan hasil kerja diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Lebih lanjut menurut Kadarman menyatakan definisi pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi dan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi, dimana untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dan menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan, (Kadarman, 2001:159).

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sebuah pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan hal penting dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan efisien oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan adanya sebuah pengawasan maka sebuah target dan sasaran yang telah direncanakan dan diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

2.2.2. Fungsi Pengawasan

Pengertian fungsi pengawasan pada dasarnya adalah untuk menialai, menganalisis, dan memberi rekomendasi serta menyampaikan mengenai laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dari sebuah departemen atau organisasi/perusahaan yang sudah diteliti. Aktivitas ini juga termasuk ke dalam fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Secara lebih terperinci berikut fungsi pengawasan yang dapat diketahui:

- a) Pengawasan menilai apakah setiap elemen/unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan tugas masing-masing.
- b) Untuk menilai surat maupun laporan apakah telah mendeskripsikan aktivitas yang aktual dengan tepat dan teliti.
- c) Sebagai penilai terkait pengontrolan aktivitas manajemen apa sudah memadai dan dilaksanakan dengan efektif.
- d) Menganalisis apakah aktivitas yang telah dikerjakan secara efektif meraih sasaran yang ditentukan sebelumnya.
- e) Meneliti apakah aktivitas dijalankan seefisien mungkin.

2.2.3. Tujuan Pengawasan

Dalam menjalankan sebuah pengawasan, tentunya perusahaan atau organisasi memiliki tujuan tertentu. Menurut Arifin (2001:23), ada beberapa unsur pengawasan yang mempunyai tujuan dan sasaran, yakni sebagai berikut:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

2.2.4. Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan internal dan eksternal, pengertian pengawasan internal yaitu kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh badan pengawasan yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang berada di lingkungan luar organisasi yang diawasi.

Berdasarkan dua tipe tersebut terdapat jenis-jenis pengawasan yang perlu diketahui sebagai berikut:

- 1) Preventif dan Represif

Pengawasan preventif dilaksanakan sebelum suatu aktivitas maupun program dijalankan. Pengawasan ini memiliki tujuan agar mencegah penyimpangan dalam suatu kegiatan. Sebagai contoh pengawasan dalam

perusahaan pada yang dilaksanakan pada aktivitas tersebut telah selesai dijalankan, contohnya pengawasan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran baik pengawasan dana desa hingga anggaran nasional dimana dana telah ditetapkan saat perencanaan kemudian telah dilaksanakan kegiatan hingga laporan pertanggungjawabannya.

2) Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif disebut juga pengawasan dekat, pengawasan ini dijalankan langsung di lokasi kegiatan yang akan diawasi. Sedangkan pengawasan pasif dilakukan dari jarak jauh seperti pengawasan dengan penelitian dan pengujian pada surat ataupun laporan hasil kegiatan yang disertai bukti-bukti terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

3) Pengawasan Kebenaran Formil

Jenis pengawasan ini merupakan pengawasan menurut hak (*rechtmatigheid*) dan memeriksa kebenaran materil terkait tujuan dilakukannya pengeluaran (*doelmatigheid*)

2.2.5. Maksud Pengawasan

Menurut Arifin (2001:23), maksud dari adanya sebuah pengawasan dilakukan yakni :

- 1) Untuk mengetahui apakah kinerja dari pegawai/karyawan dan organisasi berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk mengetahui apakah peraturan yang telah dibentuk dan ditetapkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

- 3) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah
- 4) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar

2.1.6. Hambatan Dalam Pengawasan

Ada beberapa hambatan dalam melakukan pengawasan, antara lain sebagai berikut :

1. Kurang informasi mengenai data produktivitas terutama melakukan perbaikan dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen;
2. Bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan, sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu;
3. Penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar;
4. Meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing;
5. Jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi;
6. Berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar menukar informasi antara pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal dan informal untuk dapat memelihara industrial *peace* dan antar perusahaan;

7. Pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara internal dan antar perusahaan;
8. Cepatnya terjadi perubahan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi bagi tenaga baru Kemampuan adaptasi ini bergantung dari sistem komunikasi manajemen.

indrasoft.wordpress.com/tag/hambatan-pelaksanaan-fungsi-pengawasan/
(dikutip/14-10-2019)

2.3 Pengertian Pengawasan Internal

Pengawasan Internal merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. Sedangkan pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang terdapat diluar unit lembaga. Definisi Pengawasan Internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi seperti Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional Keandalan Laporan keuangan Ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

Pengawasan intern merupakan sebuah proses, yang menjadi suatu media menuju akhir, bukan berarti akhir itu sendiri. Pengawasan intern dipengaruhi oleh personil. Hal tersebut bukanlah hanya suatu kebijakan yang berbentuk manual dan format tertulis, tetapi merupakan sekelompok individu pada tiap tingkat organisasi. Pengawasan internal dapat diharapkan untuk memberikan kepastian yang sesuai, bukan kepastian yang absolut kepada keseluruhan tingkat manajemen. Pengawasan intern dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya

sasaran yang terpisah-pisah tetapi juga untuk keseluruhan tujuan organisasi . Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Manfaat Pengawasan Internal Pengawasan intern dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. kesimpulan Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam yang di lakukan oleh pemimpin pada organisasinya untuk mengetahui apakah pekerjaan yang di kerjakan apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi.

2.4 Program

Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan, program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Program adalah

rancangan mengenai asas serta usaha. Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan dan berurutan (Muhaimin,dkk:2009).

Dengan demikian dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan proses untuk menghasilkan suatu output yang diinginkan oleh pembuat program.

2.5 Program Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Menurut Samuelson (2004) mengatakan pasar adalah sebuah mekanisme yang dimana para pembeli dan penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa. Pasar merupakan pranata penting dalam

kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pasar sudah dikenal sejak masa Jawa Kuno yaitu sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli atau tukar menukar barang yang telah teratur dan terorganisasi. Hal ini berarti pada masa Jawa Kuno telah ada pasar sebagai suatu sistem. (Nastiti, 2003) Maksudnya adalah pasar yang mempunyai suatu kesatuan dari komponen-komponen yang mempunyai fungsi untuk mendukung fungsi secara keseluruhan, atau dapat pula diartikan pasar yang telah memperlihatkan aspek-aspek perdagangan yang erat kaitannya dengan kegiatan jual-beli, misalnya adanya lokasi atau tempat, adanya ketentuan pajak bagi para pedagang, adanya berbagai macam jenis komoditi yang diperdagangkan, adanya proses produksi, distribusi, transaksi dan adanya suatu jaringan transportasi serta adanya alat tukar. Pasar dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu pasar Tradisional dan pasar Modern.

a. Pasar tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

b. Pasar modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah hypermarket, pasar swalayan (supermarket), dan minimarket.

Menurut jenisnya, pasar dapat dikategorikan dalam beberapa hal. Yaitu: jenis barang yang dijual, lokasi pasar, hari, luas jangkauan dan wujud.

a. Pasar Menurut Jenisnya

1. Pasar Konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang untuk keperluan konsumsi. Misalnya menjual beras, sandal, lukisan dan lain-lain.
2. Pasar Faktor Produksi adalah pasar yang menjual barang-barang untuk keperluan produksi. Misalnya menjual mesin-mesin untuk alat produksi barang, lahan untuk pabrik dan lainlain.
3. Pasar menurut jenis barang yang dijual dapat dibagi menjadi pasar ikan, pasar buah dan lain-lain.
4. Pasar Menurut Hari Pasar menurut hari dinamakan sesuai hari pasar itu dibuka. Misalnya Pasar Rebo dibuka khusus hari Rabu,

Pasar Minggu dibuka khusus hari Minggu, Pasar Senen dibuka khusus hari Senin

b Pasar Menurut Luas Jangkauan

1. Pasar Daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah.
2. Pasar Lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota.
3. Pasar Nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri.
4. Pasar Internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia.

c Pasar Menurut Wujud

1. Pasar Konkret adalah pasar yang lokasinya dapat dilihat dengan kasat mata. Misalnya ada los-los, toko-toko dan lain-lain. Di pasar konkret, produk yang dijual dan dibeli juga dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen juga dapat dengan mudah dibedakan.

2. Pasar Abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung. Biasanya dapat melalui internet, pemesanan telepon dan lain-lain. Barang yang diperjual belikan tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tapi pada umumnya melalui brosur, rekomendasi dan lain-lain. Kita juga tidak dapat melihat konsumen dan produsen bersamaan, atau bias dikatakan sulit membedakan produsen dan konsumen sekaligus.

Perencanaan Pengelolaan Pasar Pengelolaan dan perencanaan pasar tradisional dilakukan atas kebijakan Bupati/walikota melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan perencanaan pasar tradisional meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik. Adapun perencanaan fisik meliputi:

- d Penentuan Lokasi; Pengaturan Penentuan lokasi antara lain: mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat, dan memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.
- e Penyediaan Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasar Perencanaan fisik yang berupa penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar untuk penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar antara lain adalah: bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu,

petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah, pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup, penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan, dan bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

- f Sarana Pendukung Pengelolaan Pasar Perencanaan fisik Sarana pendukung dari fasilitas bangunan meliputi: kantor pengelola, areal parkir, tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran, penteraan, sarana komunikasi, dan area bongkar muat dagangan.
- g Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Bupati/walikota melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD. Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional. Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya. Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Pasar Dari aspek pengendalian dan Evaluasi, Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional. Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap:

1. Kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
2. Pengelola dan pedagang;
3. Pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
4. Sarana dan prasarana pasar

2.5.1 Tujuan pengelolaan pasar tradisional

Ada beberapa tujuan dalam pengelolaan pasar tradisional (permendagri No. 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan pasar tradisional), yaitu :

1. Menciptakan pasar tradisional yang tertib , teratur, aman, bersih dan sehat
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah
4. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan took modern.

Ada beberapa langkah yang dapat di lakukan dalam pengelolaan pasar tradisional agar konsumen dapat bertahan untuk berbelanja dipasar tradisional, yaitu

1. Pengelolaan pasar harus lebih professional
2. Harus mampu mengubah pola pikir pedagang.
3. Mampu memenuhi keinginan konsumen dengan baik.
4. Sarana dan prasarana yang nyaman seperti parkir, gang, penerangan, sirkulasi udara, keamanan dan kebersihan.
5. Citra pasar tradisional harus di perbaiki.
6. Secara fisik pasar tradisional harus mampu menarik konsumen untuk berbelanja.

7. Kemampuan untuk memuaskan semua pihak yang terkait dengan pasar tradisional.

2.5.2 Penataan Pasar Tradisional

Ada beberapa hal yang wajib di penuhi dalam pendirian pasar tradisional (perpres No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern), yaitu:

1. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional , pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil termasuk koperasi yang berada di wilayah tersebut.
2. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m² luas lantai penjualan pasar tradisional.
3. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib ruang public yang aman .

2.5.3 Permasalahan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemajuan Pasar Tradisional

Hal-hal yang bermasalah pada pasar tradisional pada umumnya adalah :

1. Pasar tradisional merupakan infastruktur ekonomi daerah menjadi pusat kegiatan distribusi dan pemasaran.
2. Keberadaannya kian menurun dengan berkembangnya pasar-pasar swasta modern khususnya di perkotaan. Serbuan pasar modern dengan dukungan kekuatan modal besar, sistem dan teknologi modern berhadapan langsung dengan pedagang pasar tradisional.

3. Image pasar tradisional terkesan becek, kotor, kurang nyaman , dan fasilitas minim seperti parkir, toilet, tidak ada tempat pengelolaan sampah, dan fisik kurang terawatt
4. Pasar tradisional kurang mampu berkompetisi dengan perpasaran swasta
5. Pasar tradisional lemah dalam manajemen dan kurang mengantisipasi perubahan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan pasar tradisional, yaitu:

1. Lingkungan sosial sekitar pasar mulai mengalami perubahan
2. Perubahan gaya hidup konsumen perkotaan. Konsumen ingin mendapatkan pelayanan lebih tidak hanya sekedar membeli barang
3. Perubahan masa (kompetisi) pada pasar tradisional yang tidak menjadi satu-satunya pusat perdagangan tempat berbelanja.
4. Globalisasi sudah di sadari tetapi belum diantisipasi
5. Tantangan selalu memberikan peluang semangat kompetisi dan upaya tetap maju.

2.5.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2018 tentang kewenangan pimpinan dalam melakukan pengawasan, ada beberapa wewenang dan tanggung jawab yang di lakukan antara lain :

1. Mengarahkan dan mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang pengelolaan pasar

2. Mengarahkan dan mengendalikan teknis perpasaran yang meliputi kegiatan pengembangan pasardan penataan pedagang serta ketertiban pasar
3. Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan penataan pasar, ketertiban dan kebersihan pasar serta kerja sama di bidang perpasaran
4. Memberikan saran dan pertimbangan teknis penyelenggaraan urusan pengelolaan pasar.
5. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan Pengelolaan Pasar dapat berjalan lancar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah seperangkat asumsi yang saling berkolerasi satu dengan yang lain mengenai fenomena alam secara semesta. Dalam penelitian mengenai pengelolaan Pasar Tradisional di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi dan situasi tertentu dengan pendekatan yang bersifat ilmiah dengan mengamati suatu obyek penelitian dan kemudian menjelaskan apa saja yang di amati yang berbentuk deskriptif.

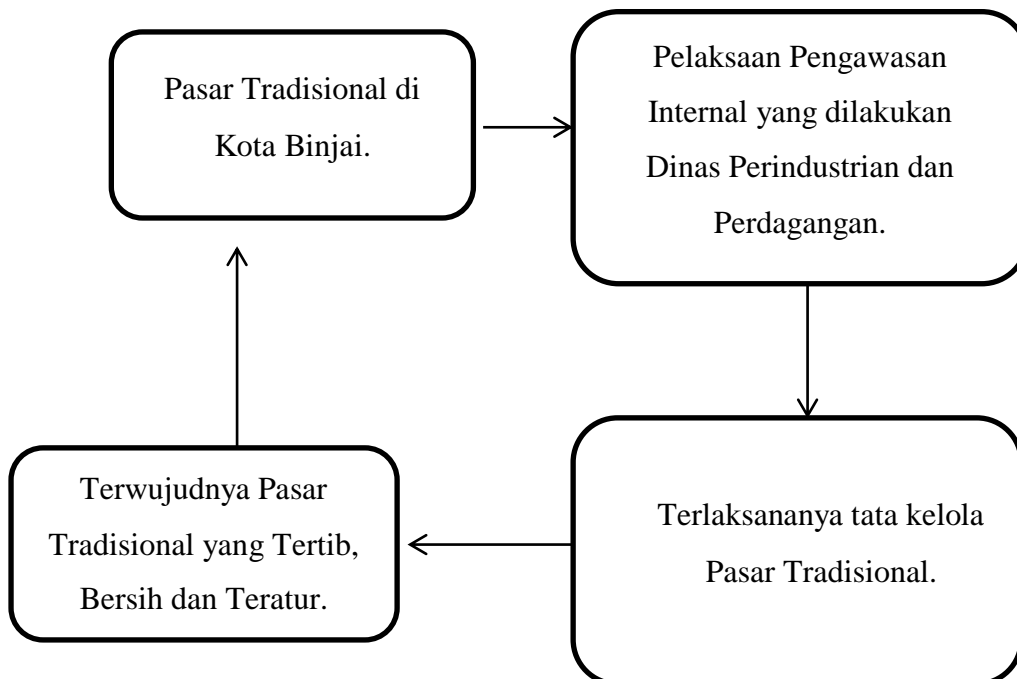
Selanjutnya di lakukan analisis data kualitatif hal ini di gunakan oleh peneliti dengan beberapa pertimbangan. Menurut peneliti pertimbangan tersebut ialah seperti ; *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan yang bersifat ilmiah. *Kedua*, metode ini menggambarkan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, metode ini membuat peneliti lebih peka dan lebih menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang di hadapi, dengan menggunakan metode kualitatif peneliti akan menjelaskan kondisi yang ada dan lebih banyak dimasukan ke dalam bentuk kata-kata tertulis dan dokumentasi (foto atau gambar). Selain itu juga peneliti akan menggunakan sumber tertulis, baik sekondr maupun primer.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan di deskripsikan dan di gambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pasar tradisional dalam membuat program tersebut berjalan dengan baik. Agar kerangka konsep dapat di jelaskan maka kerangka konsep di rangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut :

Gambar 3.1

**Kerangka Konsep Pelaksanaan Pengawasan Internal Pada Program
Pengelolaan Pasar Tradisional.**



3.3 Defenisi Konsep

Konsep adalah satuan arti yang memiliki sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek – objek yang di hadapi sehingga objek – objek di tempatkan dalam golongan tertentu. Dari uraian di atas di gunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan di teliti.

- a) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
- b) Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
- c) Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. Sedangkan pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang terdapat diluar unit lembaga. Definisi Pengawasan Internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan

oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi seperti Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional Keandalan Laporan keuangan Ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

- d) Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (Binanto:2009) Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama.
- e) Program pengelolaan pasar tradisional ingin Menciptakan pasar tradisional yang tertib , teratur, aman, bersih dan sehat. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah . Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan took modern

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi di artikan sebagai salah satutumpukan dan seperangkat yang disusun atau dasar pikir, institusi, dan kriteria tertentu (metodologi penelitian:2015). Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya tujuan pengawasan internal dalam program Pengelolaan Pasar Tradisional.
2. Adanya proses dan prosedur dalam melaksanakan pengawasan internal.
3. Adanya penataan dalam program pengelolaan pasar tradisional.
4. Adanya wewenang dan tanggung jawab pimpinan dalam melaksanakan pengawasan internal.

3.5 Narasumber Penelitian

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yakni :

1. Sekretaris Dinas : Drs.M. Uzeir Nasution
2. Kepala Bidang Perdagangan : Marlise Sirait
3. Pegawai Petugas Pengawasan Pasar : Johannes Liberty Ginting
4. Kepala Seksi Pengelolaan Pasar : Ferdinand Ginting

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang aling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan teknik pengupulan data dua cara yakni:

a Data Primer

Data yang di lakukan secara langsung pada lokasi yang di tentukan . langkah yang di lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitia yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b Data Skunder

Pengumpulan data yang relavan dengan permasalahan yang ada yang di teliti dan di peroleh dari buku atau penelitian perpustakaan, untuk mendukung penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012 : 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga menjadi data jenuh.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Melalui metode kualitatif kita dapat mengenal subyek penelitian secara pribadi dan melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia dan komunikasi yang mereka lakukan. Metode kualitatif memungkinkan kita menyelidiki konsep – konsep yang dalam pendekatan lain nya akan hilang (Bogdan:2002).

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, dan waktu penelitian dari bulan juli 2019 sampai dengan bulan September 2019.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Kota Binjai

Kota Binjai adalah salah satu kota (dahulu daerah tingkat II berstatus kota madya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km di sebelah barat ibukota provinsi Sumatera Utara, Medan. Sebelum berstatus kota madya, Binjai adalah Ibu Kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan.

Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Saat ini Binjai dan Medan di hubungkan oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Oleh karena ini, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari Provinsi Aceh.

Binjai sejak lama di juluki kota rambutan karena rambutan Binjai memang sangat terkenal, Bibit rambutan asal Binjai ini telah tersebar dan dibudidayakan di berbagai tempat di Indonesia seperti, Blitar, Jawa Timur menjadi komoditi unggulan daerah tersebut. Masih sangat sedikit terungkap mengenai asal usul kota Binjai di masa silam, yang disebut sebagai sebuah kota yang terletak di antara sungai mencirim di sebelah timur dan Sungai Bangai di sebelah barat, terletak di antara dua kerajaan Melayu yaitu, Kesultanan Deli dan Kerajaan Langkat.

Berdasarkan penuturan orang-orang tua yang kini sudah tiada yang diperkirakan mengetahui sejarah asal usul Kota Binjai, baik yang di kisahkan

maupun yang di riwayatkan dalam berbagai tulisan yang pernah dijumpai, bahwa kota Binjai itu berasal dari sebuah kampung yang kecil yang terletak di pinggir sungai Bingai kira-kira di kelurahan pecan Binjai yang sekarang.

Upacara adat dalam rangka pembukaan kampung tersebut di adakan di bawah sebatang pohon Binjai (*Mangifera caesia*) yang rindang yang batangnya amat besar, tumbuh koko di pinggir sungai Bingai yang bermuara di sungai Wampu, sungai yang cukup besar dan dapat di layari sampan-sampan besar yang berkayuh sampai jauh ke udik.

Di sekitar Pohon Binjai yang besar itulah kemudian di bangun beberapa rumah yang lama kelamaa menjadi besar dan luas yang akhirnya berkembang menjadi Bandar atau pelabuhan yang ramai di datangi oleh tongkang-tongkang yang atang dari Stabat, Tanjung Pura dan juga Selat Malaka. Kemudian nama pohon Binjai itulah yang akhirnya melekat menjadi nama kota Binjai. Konon Pohon Binjai ini adalah sebangsa pohon embacang dan istilahnya berasal dari bahasa karo.

Dalam versi lain yang merujuk dari beberapa referensi asal muasal kata Binjai yang merupakan kata baku dari istilah “binjei” yang merupakan makna dari kata “ben” dan “i-jei” yang dalam bahas karo artinya “ bermalam disini”. Pengertian ini di percaya oleh masyarakat asli kota Binjai , khususnya etnis karo merupakan cikal-bakal kota Binjai pada masa kini.

Hal ini berdasarkan fakta sejarah , bahwa pada masa dahulu kala, kota Binjai merupakan perkampungan yang berada di jalur yang di gunakan oleh “perlanja sira “ yang dalam istilah karo yang merupakan pedagang yang membawa barang

dagangan dari daratan tinggi karo dan menukarnya dengan pedagang garam daerah pesisir langkat. Perjalanan yang di tempuh perlanja sira ini hanya dengan berjalan kaki menembus hutan belantara menyusuri jalur tepi sungai dari daratan tinggi karo ke pesisir langkat dan tidak dapat di tempuh dalam waktu satu atau dua hari , sehingga selalu bermalam di tempat yang sama , begitu juga sebaliknya , kembali dari daratan rendah karo yaitu pesisir langkat , para perlanja sira ini kembali bermalam di tempat yang sama pula, selanjutnya seiring waktu menjadi sebuah perkampungan yang mereka namai dengan “ kuta Benjei”

Untuk mengulas beberapa fakta yang menjadi kekhasan kota rambutan ini yaitu:

1. Rambutan

Kota binjai terkenal dengan buah rambutan nya yang manis dan lekang rambutan merupakan buah yang kaya vitamin A dan C yang akan membuat kita mendapatkan banyak manfaat ketika kita mengonsumsinya . jadi kalau berkunjung ke Binjai jangan lupa untuk menikmati buah rambutan .

2. Burung wallet

Jika ber kunjung ke kota binjai di sore menjelang magrib kamu akan melihat burung wallet yang cukup banyak dan bertebaran yang meghiasi indahny langit sore kota binjai. Burung wallet atau puyuh ini sudah memiliki beberapa tempat di kota Binjai, bahkan ada yang khusus di budidayakan , selain itu sarang burung wallet juga memenuhi lapak pasar yang di siapkan pemerintah untuk para pedagang kaki lima yang berjalan di pinggir trotoar jalan , namun relokasi pedagang yang tidak di lanjutkan

kembali membangun nya membuat gedung /lapak yang di sediakan tempat tepat di belakang pasar tavip Binjai menjadi sarang bagi para burung wallet.

3. Mayoritas suku Melayu

Kota binjai yang dulunya berada di anatar dua kerajaan melayu ini menjadi alasan kuat mengapa kini Binjai di tempati oleh orang bersuku melayu . memang tidak dapat di pungkiri kalau ternyata di kota Binjai banyak di temukan nya orang dari suku lain, seperti , jawa, aceh batak/karo dan tionghoa. Jika kamu berjalan di pusat kota binjai maka kam akan menemukan orang-orang bersuku tionghoa yang tinggal dan jualan di pusat kota.

4. Pasar Kaget Binjai

Bagi warga Binjai pasti sudah tahu dengan pasar yang muncul di malam hari , pasar yang memenuhi separuh badan jalan ini aka selalu ramai di sore menjelang malam. Dinamakan pasar kaget karena pasar yag hanya terlihat ketika hari gelap . sepanjang pasar kaget ini di penuhidengan jajanan kuliner harga murah dan memiliki porsi yang cukup banyak.

5. Makam Pahlawan

Kota Binjai juga memiliki Taman Makam Pahlawan . di beri nama Taman makam pahlawan Syuhada yang terletak di jalan pahlawan, Kelurahan Pahlawan, kecamatan Binjai kota, Taman Makam Pahlawan Syuhada Binjai initempat beristirahat bagi para Syuhada dari kota Binjai dan sekitarnya, pada bagian tengah dari Taman Makam pahlawan Syuhada

Binjai ini terdapat tugu berbentuk bamboo runcing dan terdapat lambing Pancasila di tengah tugu tersebut.

6. Binjai Super Mall

Sekitar tahun 2006 Binjai Super Mall resmi di buka dan hingga sekarang , BSM menjadi mall terbesar di kota Binjai , mall yang memiliki berbagai hiburan seperti bioskop , pusat perbelanjaan, restaurant dan lainnya menjadi titik kumpul warga Binjai.

7. Pusat Kuliner

Kota Binjai selalu berinovasi dalam memadukan masakan agar dapat menjadi nilai jual, hal ini di buktikan dengan berbagi kuliner yang ada di kota binjai. Pemerintah pun juga ikut serta memfasilitasi tempat untuk pusat kuliner.Kota Binjai yang memiliki jargon sebagai kota idaman adalah kota kecil yang memiliki jumlah penduduk tidak banyak, namun keberagaman berbagai suku, makanan, pasar dan lainnya akan membuat.

3.9.2 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

a. Visi

Visi dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai,

“TERWUJUDNYA PENGETASAN KETENAGAKERJAAN
SERTA TERCIPTANYA INDUSTRI KREATIF, JASA
PERDAGANGAN MELALUI PENATAAN DAN

PENINGKATAN KWALITAS APARAT DAN KWALITAS PELAYANAN UNTUK TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MAJU DAN BERDAYA SAING”

b. Misi

Misi adalah langkah yang dilakukan berupa produk kegiatan yang nyata

Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

1. Perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja sert penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
2. Meningkatkan kompetensi keterampilan dan produktivitas angkatan kerja maupun tenaga kerja.
3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja.
4. Untuk meningkatkan daya saing produk hasil olahan industri di pasaran di perlukan kreatifitas untuk menghasilkan inovasi dalam menghasilkan produk dan kemasan yang memiliki daya jual sehingga mampu mendongkrak omzet penjualan.
5. Meningkatkan kontribusi sector perdagangan dalam upaya menggali dan mengembangkan potensi-potensi/sentra-sentra perdagangan.

c. Tujuan

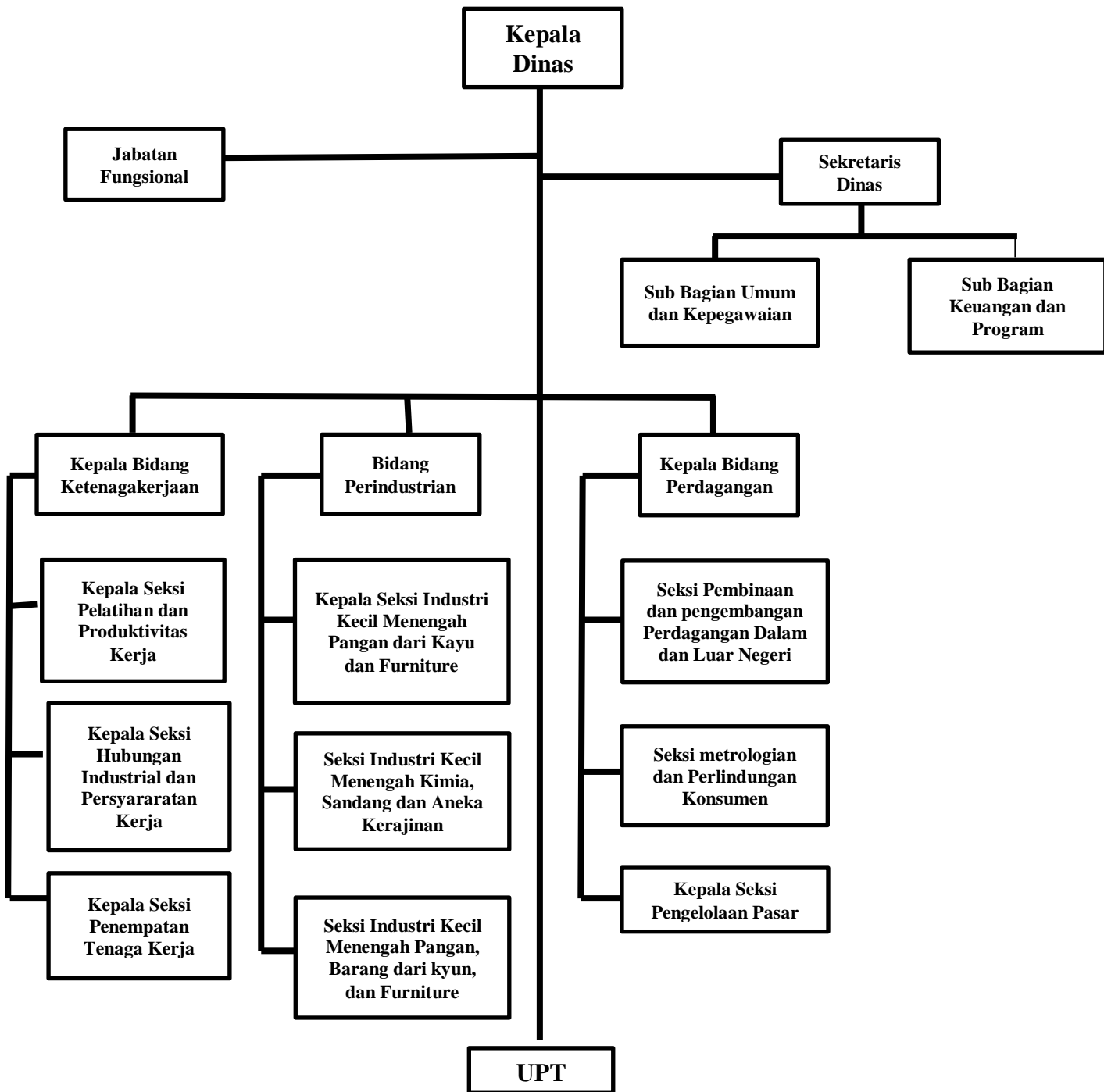
Adapun tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

1. Meningkatkan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dengan sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri, bermatabat dan mampu membangun potensi dirinya.
2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menurunya angka pengangguran di Kota Binja dengan sasaran terwujudnya sumber daya tenaga kerjayang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Meningkatkan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dengan sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri, bermatabat dan mampu membangun potensi dirinya.
4. Meningkatkan jaminan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
5. Mengembangkan industri yang berasal dari peningkatan kreatifitas, keterampilan serta individu
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan membangun sarana dan infrastruktur perdagangan.

Gambar 3.2

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Perdagangan Kota Binjai



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab 4 ini, penulis akan menjabarkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan mengolah data-data dari Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan model penjabaran hasil wawancara dan olah data menggunakan narasi. Sesi wawancara dilakukan pada sela 12 september 2019 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Pada Bab 4 ini, hasil penelitian akan dibagi menjadi kedalam dua bagian, yakni deskripsi identitas narasumber dan hasil wawancara dengan narasumber.

4.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai penulis menguraikan tentang Deskripsi Narasumber dn Hasil Wawancara.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Table 4.1
Kedaaan Narasumber Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Usia

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Usia
1	Drs.M.UZEIR NASUTION	SEKRETARIS	Stara-1 (S1)	57 Tahun
2	MARLISE SIRAIT S.Sos	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	Stara-1 (S1)	50 Tahun
3	FERDINAND GINTING S.Sos	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PASAR	Stara-1 (S1)	55 Tahun
4	JOHANNES LIBERTY GINTING	PEGAWAI PETUGAS PENGAWASAN PASAR	Stara-1 (S1)	53 Tahun

Sumber. Hasil Penelitian 2019

wawancara dalam penellitian ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber dengan mngajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi dengan menggunakan panduan wawancara, berdasarkan kategorisasi sebagai berikut:

A. Adanya tujuan program pengawasan internal Dalam Program

Pengelolaan Pasar Tradisional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Uzier Nasution, yang menyatakan bahwa sasaran dari tujuan pengawasan program pengelolaan pasar tradisional di Kota Binjai adalah menjadikan pasar tradisional sebagai pasar yang berdaya saing untuk masyarakatnya dengan lingkungan yang bersih, aman, nyaman dan tertata dengan baik. Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan khususnya pada pengelolaan pasar tradisional adalah melakukan pengawasan, *kontrolling*, dan dokumentasi lapangan. Bentuk pengawasan

yang dilakukan adalah mengontrol setiap hari kegiatan dan aktivitas pasar tradisional. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi preman pasar dan menyalahgunakan pasar tradisional untuk mencari uang dengan cara yang tidak baik. Kemudian, Beliau juga menjelaskan cara yang dilakukan adalah melibatkan masyarakat dalam program pengawasan pasar. Dinas Tata Ruang dan perindustrian Perdagangan Kota Binjai menerima keluhan langsung dari masyarakat dan segera memproses keluhan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferdinand Ginting, yang menyatakan bahwa yang menjadi sasaran utama dari tujuan program pengelolaan pasar tradisional adalah meningkatkan kebersihan, ketertiban, keamanan sesuai dengan PAD. Upaya yang dilakukan adalah selalu melakukan pendataan baik dalam segi pembayaran iuran sampah di pasar tradisional, parkir, dan lainnya. Kemudian Bapak Ferdinand juga menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan berupa mengontrol secara langsung kegiatan pasar mulai dari waktu buka sampai waktu tutup. Melakukan dokumentasi foto untuk pelengkap laporan hasil kerja serta bertanya kepada masyarakat yang menjadi penjual di pasar tradisional apa keluhan yang kerap kali dirasakan dan mengganggu aktivitas penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johannes Liberty Ginting, yang menyatakan bahwa sasaran utama dari program pengelolaan pasar tradisional Kota Binjai adalah guna mempertahankan kegiatan pasar tradisional tanpa ada campuran pungli-pungli dan kebersihan serta keamanan pasar tradisional. Upaya yang dilakukan adalah melakukan

pengawasan secara langsung oleh staff bagian pengawasan dan memantau keadaan sehari-sehari pasar. Bentuk pengawasan yang dilakukan guna sebagai program pengelolaan pasar tradisional adalah memasang CCTV ditempat-tempat tertentu agar dapat melakukan pengawasan secara digital disamping tetap melakukan pengawasan langsung. Kemudian cara yang dilakukan agar program-program dan tujuan terlaksana adalah tidak melalaikan pekerjaan dan tetap bekerja hingga jam kerja selesai. Kemudian selalu melakukan pengawasan setiap hari agar tau bagaimana perkembangan pasar tradisional di Kota Binjai.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Marlise Sirait, yang menyatakan bahwa yang menjadi sasaran dari tujuan pengawasan internal pada pasar tradisional adalah menelusuri kegiatan dan aktivitas dari pasar tradisional, melakukan pengawasan seperti ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan dan hal lainnya terkait dengan aktivitas kegiatan pasar tradisional. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah melakukan monitoring, pengarahan kepada para pedagang, khususnya pedagang kaki lima baik dari segi keamanan, lingkungan dan lainnya.

B. Adanya proses dan prosedur dalam melaksanakan pengawasan internal

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. M. Uzier Nasution, yang menyatakan bahwa sampai saat ini proses pengawasan yang dilakukan oleh staff pegawai yang terkait pengelolaan pasar sudah sesuai dengan harapan Pemerintah. Jika ada kendala yang didapat bukan sepenuhnya kelalaian dari

Dina Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan, namun pihak pihak lain yang juga berusaha mengawasi dan menguasai pasar tradisional tersebut. Pelaksanaan program juga sudah sesuai dengan SOP. Dikarenakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan dapat dilaporkan kepihak berwajib jika mendapati kelalaian. Sesuai dengan teknis adalah melakukan pengawasan langsung setiap harinya dan memberikan laporan hasil kerja. Ketika menghadapi kendala dalam pelaksanaan program, seperti contoh ketika masih ada sampah sembarangan lingkungan rumah dan dan lingkungan pasar, maka masyarakat dapat melaporkannya langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferdinand Ginting, yang menyatakan bahwa program pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas terkait khususnya staff/peawai divisi pengelolaan pasar sudah bekerja dengan baik dan maksimal. Upaya yang dilakukan adalah tetap menjaga lingkungan pasar tradisional serta mmebuat laporan hasil ker tahunan untuk kemudian diserahkan oleh pusat. Beliau juga mengatakan bahwa jika prosedur pelaksanaan pengawasan dari pasar tradisional sudah sesuai dengan SOP, namun pada proses pelaksanaannya lebih kepada peraturan kebijakan pada setiap divisi atau bagian. Kemudian beliau juga mengatakan jika kecil sekali terjadi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan, karena pengawasan selalu dilaksanakan setiap dari dan melaporkan hasil kerja dalam setiap hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johannes Liberty Ginting yang menyatakan bahwa prose dan prosedur dalam pengawasan internal di

Pasar tradisional sudah memenuhi harapan dari Pemerintah. Prosedur pelaksanaan dijalankan sesuai dengan SOP dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Teknis pelaksanaan tugas berdasarkan kepada kebijakan dan peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah daerah. Kemudian Beliau juga menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala terkait pengawasan yang dilakukan terhadap pasar tradisional adalah melakukan pendataan dan mengetahui lebih dalam apa yang menjadi hambatan dan kendala dan membuat laporan hasil kerja untuk diproses lebih lanjut kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marlise Sirait, yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan pengawasan internal pada pasar tradisional adalah melakukan pengarahan, perhatian, pelatihan, penataan pedagang dan pengawasan keseluruhan isi dari lingkungan pasar tradisional. Pelaksanaan pengawasan juga sudah sesuai dengan standar SOP yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Kemudian, dalam menghadapi kendala ketika melakukan pengawasan adalah menemukan solusi dan terjun langsung ke lapangan agar dapat melihat apa permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Seperti contoh, jika ada keluhan dalam kemacetan, tingkat keamanan, maupun sampah yang mengganggu, maka pengelola pasar dan bagian pengawasan akan berada dilapangan untuk mengidentifikasi dan membuat laporan hasil kerja agar dapat diproses oleh petinggi-petinggi Pemerintah daerah.

C. Adanya penataan dalam program pengelolaan pasar tradisional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. M. Uzier Nasution, yang menyatakan bahwa penataan yang dilakukan dalam program pengelolaan pasar tradisional berupa penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat pembuangan sampah, jalur khusus untuk kendaraan pengangkut barang atau pemasok dan lain sebagainya. Kemudian adanya informasi laporan dari pihak pengelola terkait dengan identifikasi pedagang mulai dari bahan yang diperjual belikan (biasanya daging hewan ternak), laporan hasil sampling dan uji dan sejenisnya. Untuk area parkir yang tersedia pada pasar tradisional, Beliau menjelaskan bahwa lahan parkir bukan kawasan dan wewenang dari pihak pengelola pasar tradisional maupun Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, melainkan dari Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferdinand Ginting, yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi masyarakat adalah tetap memperbolehkan para pedagang kaki lima untuk berjualan, namun tetap pada porsinya. Porsi dalam hal ini bermaksud kepada area penjualan yang dipakai oleh para pedagang kaki lima. Untuk penjaminan lingkungan pasar yang bersih, aman, teratur dan rapi, pengelola pasar yang bekerja di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan melakukan survey dilapangan, kemudian menyediakan jasa pemungutan sampah dan membersihkan area pasar tradisional setelah jam penjualan (dalam arti diatas jam 10.00 WIB) agar dibersihkan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johannes Liberty Ginting, yang menyatakan bahwa penataan program dan prosedur dalam pengawasan internal pasar tradisional berupa melakukan sistem monitoring kepada para pedagang, baik pemeriksaan surat-surat kepemilikan atau sewa tempat dengan benar, kemudian untuk pedagang yang menjual daging, maka akan diadakan uji kesehatan dan kebersihan tempat maupun kondisi daging itu sendiri. Terutama jika pada hari-hari besar tertentu dan lain sebagainya. Beliau juga menjelaskan bahwa pengawasan lahan parkir bukanlah bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola melainkan Dinas Perhubungan. Namun kedua pihak tersebut saling bekerja sama untuk kesejahteraan lingkungan pasar tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marlise Sirait, yang menyatakan bahwa penataan yang dilakukan terhadap program pengawasan pasar tradisional adalah pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan pedagang pasar, pengelolaan sampah pasar, peningkatan keamanan dan kenyamanan pasar serta pembangunan pasar tradisional. Bentuk pengawasan dan keringanan prosedur sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat membantu masyarakat dalam membayar iuran pungutan sampah, memberikan hak untuk pedagang kaki lima untuk tetap berjualan dengan tertib dan penambahan fasilitas pasar. Kemudian untuk permasalahan lahan parkir, Beliau menjelaskan bahwa untuk pengawasan lahan parkir, pengelola pengawasan pasar tradisional dan Dinas Tenaga

Kerja dan Perindustrian Perdagangan bukan dalam area mereka. Lahan parkir beserta pengawasannya menjadi bagian dari Dinas Perhubungan.

D. Adanya kewenangan tanggung jawab pimpinan dalam melaksanakan pengawasan internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Uzier Nasution, yang menyatakan bahwa untuk setiap kepala bidang, kepala seksi, kepala pengelola dan terkait dengan program pengawasan internal memiliki masing-masing kewenangan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasasn internal. Seperti contoh, Kabid dan Kasi bagian keuangan tentunya memiliki kewenangan dalam hal dana anggaran, penyedia sarana dan prasarana dan hal-hal terkait. Sampai saat ini kewenangan dan tanggung jawab dari para pelaksana bagian program pengawasan internal sangat seimbang. Semua pihak saling bekerja sama demi memberikan pelayanan yang terbaik baik masyarkat. Pertanggung jawaban kinerja dari masing-masing pimpinan dan divisi adalah melakukan evaluasi kerja dan laporan hasil kerja yang data-datanya akan di input dan disesuaikan dengan SOP dan peraturan kebijakan terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ferdinand Ginting, yang menyatakan bahwa kewenangan masing-masing pimpinan dalam pelaksanaan program dan tanggung jawab sudah berjalan dengan efektif. Sebagai contoh, pihak pengelola adalah salah satu peran pengawasan yang mempunyai tugas yang begitu besar. Apa saja laporan masyarakat yang terinput di Pemerintahan daerah, maka pihak pengelola akan mendapat

panggilan untuk melakukan evaluasi dan penjelasan lebih spesifik. Hal ini dapat disebut dengan Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di kantor DPRD Kota Binjai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johannes Liberty Ginting, yang menyatakan bahwa kewenangan tanggung jawab masing-masing pimpinan sudah berjalan baik sesuai dengan SOP dan kebijakan yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan dalam mempertanggung jawabkan kinerja pimpinan adalah hasil dari laporan hasil kerja dan penanganan dalam hambatan-hambatan yang didapat dalam proses pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marlise Sirait, yang menyatakan bahwa kewenangan pimpinan dalam pelaksanaan program pengawasan internal adalah memberikan arahan dan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Kemudian, sampai saat ini setiap bagian pimpinan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terbukti dari hasil laporan kerja yang dikirimkan kepusat tidak menemukan permasalahan serius dalam prosesnya.

4.2. Pembahasan

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan

lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, pasar tradisional masih menjadi pusat pasar bagi masyarakat yang akan melakukan proses jual beli. Masyarakat lokal masih mempercayai bahwa melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional lebih murah dan lebih nyaman dikarenakan mendapatkan proses tawar-menawar dibanding berbelanja di supermarket besar. Namun kerap kali ditemukan bahwa pasar tradisional identik dengan kondisi lingkungan, tingkat keamanan, dan ketertiban yang kurang baik. Seperti contoh, banyak dari pasar tradisional dengan kondisi jalanan yang penuh dengan kubangan, bau tidak sedap, banyaknya pungli (pungutan liar), pencopetan dan hal-hal lain yang merugikan masyarakat baik penjual maupun pembeli.

Untuk itu, agar tingkat keamanan, ketertiban dan kenyamanan dari sebuah pasar tradisional tetap berjalan dengan baik, maka perlu diadakannya pengawasan internal dari pihak pengelola pasar tradisional dan Pemerintah daerah terkait. Salah satu pasar tradisional yang mendapat perhatian dan pengawasan yang baik adalah pasar tradisional di Kota Binjai. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dan para staf pegawai bagian pengelola pasar tradisional, melakukan pengawasan internal untuk tetap menjamin kenyamanan masyarakat Kota Binjai.

4.2.1 Adanya tujuan pengawasan internal dalam program pengelolaan pasar tradisional

Menurut Arifin (2001:23), ada beberapa unsur pengawasan yang mempunyai tujuan dan sasaran, yakni menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah, menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan dan membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai sasaran dan tujuan dilakukannya pengawasan internal pada program pengelolaan pasar tradisional di Kota Binjai adalah sebagai bentuk perlindungan, pembinaan, penyedia sarana dan prasarana serta tingkat kesehatan bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan dan aktivitas di pasar tradisional. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan bersama dengan pihak pengelola pasar tradisional berupa monitoring dan evaluasi kerja. Model pengawasan monitoring dapat berbentuk pengawasan seperti pengendalian pekerjaan dan para penjual di pasar tradisional, perbaikan lingkungan daerah sekitar pasar tradisional seperti selokan, sampah yang menumpuk, jalan dan lain sebagainya. Sedangkan model pengawasan evaluasi lebih kepada laporan hasil kerja yang dibuat dan oleh pengelola dan kemudian di laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Hal ini dapat dibuktikan melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ferdinand Ginting, yang menyatakan bahwa yang menjadi sasaran utama dari tujuan program pengelolaan pasar tradisional adalah meningkatkan kebersihan, ketertiban, keamanan sesuai dengan PAD. Upaya yang dilakukan adalah selalu melakukan pendataan baik dalam segi pembayaran iuran sampah di pasar tradisional, parkir, dan lainnya.

4.2.2 Adanya proses dan prosedur dalam melaksanakan pengawasan internal

Menurut Halim dan Damayanti (2007:44) menyatakan bahwa sebuah pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya dan Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop, Itwilkab/kota.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa proses dan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar dan Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Perdagangan Kota Binjai berdasar pada Peraturan Daerah Kota Binjai nomor 8 tahun 2001 tentang organisasi lembaga teknis daerah Kota Binjai pada pasal 28, 29 dan 30 dimana Kantor Pengelolaan Pasar Kota Binjai merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Binjai yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui

Sekretaris Daerah. Kantor Pengelolaan Pasar Kota Binjai mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pasar-pasar yang meliputi perencanaan, penertiban serta penyelenggaraan retribusi pasar. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 diatas, Kantor Pengelolaan Pasar Kota Binjai mempunyai tugas: Melakukan pelaksanaan kewenangan dibidang umum yang meliputi pekerjaan pengelolaan pasar, seperti : Melakukan pelaksanaan kewenangan dibidang umum yang meliputi pekerjaan pengelolaan pasar, Melaksanakan kebijaksanaan teknis pengelolaan dan pembangunan dibidang perpasaran, Mengelola perizinan dan pelaksanaan pengamanan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan retribusi pasar, Melaksanakan peningkatan dan pengembangan operasional serta pemeliharaan dan pembangunan bidang kebersihan pasar, Mengelola perizinan dan pengawasan serta pengendalian pengelolaan kebersihan pasar, Mengelola administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi serta ketatalaksanaan Kantor serta Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Kantor. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2001 tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan membentuk SOP sesuai dengan kebijakan tersebut yang nantinya pada pelaksanaan pengawasan internal menjadi dasar untuk mengelola sebuah pasar tradisional.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Marlise Sirait, yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan pengawasan internal pada pasar tradisional adalah melakukan pengarahan, perhatian, pelatihan, penataan pedagang dan pengawasan keseluruhan isi dari lingkungan pasar tradisional. Pelaksanaan pengawasan juga sudah sesuai dengan standar SOP yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Kemudian, dalam menghadapi kendala ketika melakukan pengawasan adalah menemukan solusi dan terjun langsung ke lapangan agar dapat melihat apa permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Seperti contoh, jika ada keluhan dalam kemacetan, tingkat keamanan, maupun sampah yang mengganggu, maka pengelola pasar dan bagian pengawasan akan berada dilapangan untuk mengidentifikasi dan membuat laporan hasil kerja agar dapat diproses oleh petinggi-petinggi Pemerintah daerah.

4.2.3 Adanya penataan dalam program pengelolaan pasar tradisional

Menurut Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007, ada beberapa hal yang wajib di penuhi dalam pendirian pasar tradisional tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern), yaitu: Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional , pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil termasuk koperasi yang berada di wilayah tersebut,

Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m² luas lantai penjualan pasar tradisional serta Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib ruang public yang aman.

Penaatan yang dilakukan dalam program pengawasan internal di pasar tradisional Kota Binjai adalah menerima keluhan dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, kemudian mempertanggung jawabkan permasalahan tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RPD) di kantor DPRD Kota Binjai dan mempertanggung jawabkan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat tersebut. Kemudian, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam hal pengamanan dan pengawasan lahan parkir di pasar tradisional.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dengan bapak Drs. M. Uzir Nasution, yang menyatakan bahwa penataan yang dilakukan dalam program pengelolaan pasar tradisional berupa penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat pembuangan sampah, jalur khusus untuk kendaraan pengangkut barang atau pemasok dan lain sebagainya. Kemudian adanya informasi laporan dari pihak pengelola terkait dengan identifikasi pedagang mulai dari bahan yang diperjual belikan (biasanya daging hewan ternak), laporan hasil sampling dan uji dan sejenisnya. Untuk area parkir yang tersedia pada pasar tradisional, Beliau menjelaskan bahwa lahan parkir bukan kawasan dan wewenang dari pihak pengelola pasar tradisional maupun Dinas Tenaga Kerja dan

Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, melainkan dari Dinas Perhubungan.

4.2.4 Adanya kewenangan dan tanggung jawab pimpinan dalam melaksanakan pengawasan internal

Menurut Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2018 tentang kewenangan pimpinan dalam melakukan pengawasan, ada beberapa wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan antara lain : Mengarahkan dan mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang pengelolaan pasar, Mengarahkan dan mengendalikan teknis perpasaran yang meliputi kegiatan pengembangan pasardan penataan pedagang serta ketertiban pasar, Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan penataan pasar, ketertiban dan kebersihan pasar serta kerja sama di bidang perpasaran, Memberikan saran dan pertimbangan teknis penyelenggaraan urusan pengelolaan pasar serta Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan Pengelolaan Pasar dapat berjalan lancar.

Kewenangan dan tanggung jawab juga diperlihatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai bersama dengan pengelola pasar tradisional. Hal ini terlihat dalam bentuk serah terima laporan hasil kerja yang diberikan setiap harinya oleh pengelola pasar kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Selain itu, Dinas dan pengelola juga bersedia diperiksa oleh Badan Lintas

Sektoral yang diutus oleh Pemerintah pusat untuk melihat kinerja dan laporan hasil kerja beserta anggaran dana yang dialokasikan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Johannes Liberty Ginting, yang menyatakan bahwa kewenangan tanggung jawab masing-masing pimpinan sudah berjalan baik sesuai dengan SOP dan kebijakan yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan dalam mempertanggung jawabkan kinerja pimpinan adalah hasil dari laporan hasil kerja dan penanganan dalam hambatan-hambatan yang didapat dalam proses pengawasan.

Namun, meskipun para pimpinan Dinas dan kepala pengelola pasar menjalankan tugasnya dengan baik, tidak dipungkiri tetap mendapatkan kendala/hambatan dalam proses pengawasan internal di pasar tradisional. Hambatan tersebut berupa masih ada sebagian kecil dari masyarakat khususnya penjual yang kurang mengerti dan memahami arti kebersihan. Sebagai contoh, pengelola pasar selalu membersihkan area pasar tradisional diatas jam 10.00 WIB setelah pusat dari proses jual beli telah selesai, kemudian membersihkan area pasar tradisional, namun masih ada saja sampah dan para penjual yang membuang sampah sembarangan. Hambatan lain yang ditemukan berupa masih banyak masyarakat setempat yang memanfaatkan pasar tradisional sebagai mata pencaharian tidak halal, seperti preman-preman yang terkadang meminta pungli, parkir liar dan tindak kriminalisme seperti pencopet.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan kesimpulan terkait dengan judul penelitian penulis “Pelaksanaan pengawasan internal pada program pengelolaan pasar tradisional di Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian Perdagangan Kota Binjai”, yakni

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan internal terhadap pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai efektif. Namun ada beberapa masalah tentang penataan yang belum berjalan dengan baik. Bentuk pengawasan internal yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai terhadap pasar tradisional Kota Binjai adalah pemantauan (*monitoring*) yang didalamnya terdapat pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan pedagang pasar, pengelolaan sampah pasar, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pasar serta pembangunan pasar tradisional. Kemudian bentuk pengawasan lainnya adalah evaluasi dan laporan hasil kerja yang didalamnya terdapat penyusunan tujuan proyek serta proses *input* dan *output*, meninjau dan mempelajari pengaduan dan keluhan masyarakat seputar pasar tradisional, melakukan *survey*, serta pendokumentasian kerja dan kondisi lapangan untuk laporan hasil kerja. Hambatan yang ditemukan dalam proses pengawasan internal di pasar tradisional Kota Binjai adalah masih ada sebagian kecil dari masyarakat khususnya penjual yang kurang mengerti dan memahami arti

kebersihan serta masih banyak masyarakat setempat yang memanfaatkan pasar tradisional sebagai mata pencaharian tidak halal, seperti preman-preman yang terkadang meminta pungli, parkir liar dan tindak kriminalisme seperti pencopet.

5.2. Saran

Adapun saran yang akan ditulis dan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai bahan masukan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yakni sebagai berikut :

- a. Diharapkan agar Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai lebih meningkatkan pengawasan. Tidak hanya melakukan pengawasan langsung saja, namun juga melakukan pengawasan seperti memasang kamera CCTV agar lebih memudahkan memantau dan mengawasi tindakan pungli dan premanisme.
- b. Diharapkan agar Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, meningkatkan pembangunan pasar seperti selokan, jalan yang bagus dan tempat berbelanja yang baik agar menambah rasa kenyamanan berbelanja di lingkungan yang bersih.
- c. Diharapkan agar Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, lebih menambah personil/staff pegawai dalam melakukan pengawasan internal agar keamanan di pasar tradisional lebih baik lagi.

DAFTAR PUSAKA

Arifin, Abdul Rahman. 2001. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Jakarta : CV. Aji Mas Agung.

- Anonymous. 2012. *Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Binanto. 2009. *Konsep Dasar Program*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ching, Francis.D.K. 2000. *Arsitektur: Bentuk, Ruang, dan Susunannya*, Jakarta: Erlangga.
- Fathoni, Abdulrahmat. 2006. *Managemen Sumber Daya Manusia*, Bandung. Rineka Cipta.
- Halim, Abdul & Damayanti, Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*, Yogyakarta : UPP. STIM. YKPN.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Managemen*, Jakarta : Prehallindo.
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2004. *Peretribusian*. Andy: Yogyakarta. Mulyanto, H.R. 2008. *Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Muhaimin, *et.al.* 2009. *Managemen Program dan Aplikasinya*, Bandung : Pustaka Setia.
- Sirojuzilam, Dan Mahalli, K. 2010. *Regional, Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. USU Press. Medan.
- Supranto. 1997. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Menaikkan Pangsa Pasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Swastha, B. & Handoko. H. 2011. *Manajemen Pemasaran dan Analisis Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Dokumen :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2018 tentang kewenangan dan tanggung jawab pimpinan

Internet :

indrasoft.wordpress.com/tag/hambatan-pelaksanaan-fungsi-pengawasan/dikutip/14-10-2019)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Riski Mutia Dewi
Tempat/Tanggal Lahir : Adil Makmur, 29 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Karya wisata , Komplek j.city Medan Johor
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Anuar
Nama Ibu : Sry Wahyuni
Alamat : Desa Adil Makmur Kec.Bosar Maligas

Pendidikan

1. Tahun 2003-2009 : SD Negeri 094124 Dusun Pengkolan
2. Tahun 2009-2012 : SMP Yapendak Tinjowan
3. Tahun 2012-2015 : SMA Al-Azhar Medan
4. Tahun 2015 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2019

Riaki Mutia Dewi

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul : PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PROGRAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A. Adanya Tujuan Pengawasan Internal dalam Program Pengelolaan Pasar Tradisional;

1. Bagaimana sasaran yang dirumuskan dalam mencapai tujuan pengawasan program pengelolaan pasar tradisional di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan kota Binjai; ?
2. Bagaimana upaya dalam melaksanakan sasaran pengawasan agar tujuan pengawasan terhadap program pengelolaan pasar tradisional dapat segera tercapai;
3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam program pengelolaan pasar tradisional;
4. Bagaimana cara melakukan pengawasan program pengelolaan pasar tradisional sehingga tujuan pengawasan internal dapat tercapai;

B. Adanya Proses dan Prosedur dalam Melaksanakan Pengawasan Internal ;

1. Bagaimana Proses pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan pasar tradisional, apakah sudah memenuhi harapan pemerintah;
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengawasan internal dalam program pengelolaan pasar tradisional sudah sesuai dengan SOP;
3. Bagaimana dalam melaksanakan pengawasan program pengelolaan pasar tradisional sudah sesuai dengan peraturan daerah atau pedoman teknis tentang prosedur pelaksanaan tugas ?
4. Bagaimana upaya Dinas dalam mengatasi kendala , jika dalam proses atau prosedur pengawasan terjadi penyimpangan;

Handwritten signature and date:
31072019

C. Adanya Penataan dalam program pengelolaan pasar tradisional;

1. Bagaimana dinas melakukan pengawasan dalam memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional;
2. Bagaimana dinas pengawasan dalam penyediaan areal parkir sesuai dengan kebutuhan parkir pasar tradisional;
3. Bagaimana dinas pengawasan penyediaan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman dan tertib ruang public yang aman ;
4. Bagaimana dinas dalam menyikapi hambatan/kendala yang dihadapi agar pengawasan dalam penataan pasar tradisional dapat terlaksanaan dengan sebaik-baiknya ?

D. Adanya Kewenangan dan Tanggung Jawab Pimpinan dalam Melaksanakan Pengawasan Internal.

1. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, apakah pimpinan memiliki Wewenang dan Tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional;
2. Bagaimana apakah wewenang dalam pelaksanaan tugas sudah seimbang dengan tanggungjawab pelaksanaan tugas pengawasan dalam pengelolaan pasar tradisional;
3. Bagaimana tanggung jawab yang dimiliki pimpinan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap program pengelolaan pasar tradisional;
4. Bagaimana cara mempertanggungjawabkan kinerja pengawasan internal terhadap masyarakat dalam melakukan pengawasan program pengelolaan pasar tradisional;



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625074
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Agung, Cerdas & Terpercaya
Perilawab surat ini agar disebutkan
ir dan langganinya

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sl-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan ...IAH.....
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 5 Januari 2015

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Riski Mutia Dewi
NPM : 1503100109
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Tabungan sks : 120 sks, IP Kumulatif 3.24

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal pada program pengelolaan pasar tradisional di Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Perdagangan kota Binjai	24
2	Efektivitas kinerja pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan di Puskesmas Besar Maligas kab. Simalungun	
3	Pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai di Dinas tenaga kerja, perdagangan kota Binjai	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

10-071

(Signature)

(Riski Mutia Dewi)

pembimbing R. Kurnias

Medan, tgl.20....

Ketua,

(Signature)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.071/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : 05 Januari 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RISKI MUTIA DEWI**
N P M : 1503100109
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PROGRAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BENJAI**

Pembimbing : Drs. R. KUSNADI, M.AP

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 05 Januari 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 02 Jumadil Awal 1440 H
08 Januari 2019 M



Dekan *[Signature]*

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, ... 2 Juli ... 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RISKI MUTIA DEWI
 N P M : 1503100109
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10:Q71/SK/II.3/UMSU-03/F/2019.. tanggal 05 Januari 2019 dengan judul sebagai berikut :

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PROGRAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
 Pembimbing

(Drs. R. RISNIADI, M. AP)

Pemohon,

(RISKI MUTIA DEWI)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 536/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Jumat, 05 Juli 2019
 Waktu : 14.00 WIB s/d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.I.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	SASKIA DWI SALSABILA	1503100068	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	KINERJA PEGAWAI DALAM PENGENDALIAN PROGRAM ADIWITYATA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
2	AYU RAMADANI	1503100011	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 28 TAHUN 2011 DALAM PELAKSANAAN STANDARISASI KELAYAKAN DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN
3	DINDA PUSPA RINY	1503100132	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2007 DALAM UPAYA PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN DI KOTA MEDAN
4	MUTIA PUTRI	1503100078	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA
5	RISKI MUTIA DEWI	1503100109	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PROGRAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

Medan, 29 Sya'awal 1440 H

08 Juli 2019 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Riski Mutia Dewi
N P M : 1503100109
Jurusan : Ilmu Administrasi Public
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Internal Pada Program Pengelolaan Pasar Tradisional di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10-07-2019	Penyusunan Daftar wawancara	
2.	20-07-2019	Pengelolaan Data	
3.	5-08-2019	Bimbingan Bab 4	
4.	13-08-2019	Rerisi Bab 4	
5.	2-09-2019	Pengelolaan Data	
6.	16-09-2019	Bimbingan Bab 4 dan 5	
7.	16-09-2019	Rerisi Bab 4 dan 5, Abstrak	
8.	2-10-2019	ACC Skripsi	

Medan, 11 September 2019

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.sos, M.S.P.)

Ketua Program Studi,
A/n Sekretaris

(Naili Khairah S.IP, M.Pd)

Pembimbing Ie : ...

(Drs. R. KURNIAWATI, M.Pd)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Slr-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 879/UND/II.3-AUU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Oktober 2019
Waktu : 07.45 Wfb s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6 ✓	ENI LERIAN	1503100077	MALIL KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	Drs. R. KUSNADI, M.AP	KINERJA DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI DELI SERDANG
7 ✓	RISKI MUTIA DEWI	1503100109	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PROGRAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
8 ✓	MUTIA PUTRI	1503100078	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	MALIL KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI PDAM TIRYANADI PROVINSI SUMATERA UTARA
9 ✓	RAYZZA MAULANA	1503100121-P	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	MALIL KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM RANGKA PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
10 ✓	FANI AZRIAN	1503100123	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 DALAM UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAKTEK TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1. Ditetapkan oleh :

Rektor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketuis

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Medan, 10 Shafar 1441 H
09 Oktober 2019 M

Sekretaris

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 662541
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 591/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
2019M
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 02 Dzul-Hijjah 1440 H
03 Agustus 2019 M

Kepada Yth : Kepala Kesbangpol Kota Binjai
di-
Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RISKI MUTIA DEWI**
N P M : 1503100109
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PROGRAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Sudirman, No.6 Telepon 8821784 – 8821748
BINJAI - 20714

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 - 7009

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan setelah membaca/memperhatikan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 591/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 tanggal 3 Agustus 2019 tentang Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa dan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Nomor 070 - 1625 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini kami berikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Riski Mutia Dewi
NPM : 1503100109
Alamat : Jl. Karya Wisata Komplek J. City
Pekerjaan : Mahasiswi
Kewarganegaraan : Indonesia
Judul : **Pelaksanaan Pengawasan Internal Pada Program Pengelolaan Pasar Tradisional di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai**
Peserta : Sendiri
Tempat Penelitian : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
Lamanya : 2 (dua) minggu
Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu harus melapor dan berkonsultasi kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi di tempat penelitian.
2. Harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Binjai.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penelitian.
4. Hasil lengkap penelitian sebanyak 2 (dua) set harus sudah diserahkan kepada Walikota Binjai (c.q. **Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Binjai**) dan dalam bentuk format PDF ke email litbang.bappedakotabinjai@gmail.com selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai dilakukan.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan batal atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Binjai apabila pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Surat Izin Penelitian ini berlaku selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bersedia mematuhi
Ketentuan Butir 1 s.d 6


Riski Mutia Dewi

Dikeluarkan di Binjai
pada tanggal 30 Agustus 2019

An. WALIKOTA BINJAI
SEKRETARIS DAERAH KOTA



M. MAHFULLAH P. DAULAY, S.STP, M.AP
PENYUSUN UMMA MADYA
NIP. 19770924 199711 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bapak Walikota Binjai, sebagai laporan.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 65 Telp. 061 - 8823619 Fax. 061 - 8823619
Binjai 20717
email : bakesbangbinjai@yahoo.com

Binjai, 28 Agustus 2019

Nomor : 070 - 1625
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin
Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Di-
Medan

REKOMENDASI

Sehubungan dengan surat pemberitahuan penelitian Nomor : 591/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal 3 Agustus 2019 perihal tersebut diatas, kepada :

Nama : Riski Mutia Dewi
NPM : 1503100109
Alamat : Jl Karya Wisata Komplek J.City
Pekerjaan : Mahasiswi
Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
Judul : " *Pelaksanaan Pengawasan Internal Pada Program Pengelolaan Pasar Tradisional Di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai* ".
Lamanya : 2 (dua) Minggu
Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak kami tidak menaruh keberatan dengan catatan sebagai berikut :

- Untuk Pengawasan diminta surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai c/q Sekretaris Daerah Kota Binjai supaya tembusannya diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Binjai
- Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/per aturan yang berlaku dan menjaga keamanan/ketertiban umum.
- Selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah berakhir mengadakan Penelitian Lapangan, diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Binjai.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BINJAI
SEKRETARIS

Hj. ERN SISWATI, S.Sos
PEMBINA TK I
NIP. 196301091986112001

Tembusan :

1. Bapak Walikota Binjai (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kota Binjai
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip